

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROGRAM REVITALISASI PASAR
(Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim)**

Skripsi

Oleh

Oci Anggraini



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

SOSIO-ECONOMIC IMPACT OF MARKET REVITALIZATION PROGRAM (Case Study of Perumnas Way Halim Market Revitalization)

BY

OCI ANGGRAINI

In the era of globalization, common problems that occur in a traditional market in Indonesia is poor in terms of physical facilities, infrastructure to weak management. To face the competition with the modern market, efforts are needed in the repair of traditional markets owned by the government in urban areas through a program of revitalization of the market to optimize the function returns the traditional market. This study identifies the socio-economic impacts that arise from the implementation of the program of revitalization of the market Perumnas Way Halim Bandar Lampung. This study uses qualitative methods, type a descriptive case study approach and data collection techniques using purposive sampling. The results of the study concluded that a variety of socio-economic impact of the implementation of the revitalization of the Market Perumnas Way Halim perceived by traders varies depending on the layer group merchant itself. The revitalization of the market for large traders who relatively have a capital economic and social stable to bring a positive change such as the desire and passion to promote their business in order to grow better. For small traders, the revitalization of the market felt not bring prosperity to a better direction. The presence of the revitalization of the market to shut down their businesses visible with the change of income had declined compared to when before revitalized. In addition, the revitalization of the Market Perumnas Way Halim also brought a shift in social relations in the market. For large traders tend to acquire a network of trade more widely with the outside world. While for small traders, social relations is increasingly eroded by the loss of customers so that they have to rebuild from the beginning of the relationship that was interrupted. As well as some turmoil and cons that appeared to be caused by the injustice done by the managers concerned.

Key Words: traditional market, trader, market revitalization, the impact of social, economic.

ABSTRAK

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROGRAM REVITALISASI PASAR (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim)

OLEH

OCI ANGGRAINI

Di era globalisasi, permasalahan umum yang terjadi pada pasar tradisional di Indonesia adalah buruknya segi fisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan. Untuk menghadapi persaingan dengan pasar modern, diperlukan upaya dalam perbaikan pasar-pasar tradisional milik pemerintah di perkotaan melalui program revitalisasi pasar demi mengoptimalkan kembali fungsi pasar tradisional. Kajian ini mengidentifikasi dampak sosial ekonomi yang muncul dari pelaksanaan program revitalisasi pasar Perumnas Way Halim di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengambilan data purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbagai dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim yang dirasakan oleh pedagang berbeda-beda bergantung pada lapisan kelompok pedagang itu sendiri. Revitalisasi pasar bagi pedagang besar yang relatif memiliki kapital ekonomi dan sosial yang stabil membawa perubahan positif seperti keinginan dan semangat untuk memajukan usahanya agar berkembang lebih baik. Bagi pedagang kecil, revitalisasi pasar dirasakan belum membawa kesejahteraan ke arah yang lebih baik. Adanya revitalisasi pasar mematikan usaha mereka yang terlihat dengan perubahan pendapatan yang sempat menurun dibandingkan ketika sebelum direvitalisasi. Di samping itu, revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim juga membawa pergeseran relasi sosial di dalam pasar. Bagi pedagang besar cenderung memperoleh jaringan perdagangan lebih luas dengan dunia luar. Sedangkan bagi pedagang kecil, relasi sosial tersebut semakin terkikis dengan hilangnya pelanggan sehingga mereka harus membangun kembali dari awal relasi yang terputus. Serta beberapa gejolak dan kontra yang muncul disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pengelola terkait.

Kata Kunci: pasar tradisional, pedagang, revitalisasi pasar, dampak, sosial ekonomi.

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROGRAM REVITALISASI PASAR
(Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim)**

Oleh

Oci Anggraini

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROGRAM
REVITALISASI PASAR (Studi Kasus
Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim)**

Nama Mahasiswa : **Oci Anggraini**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416041075**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.
NIP 197212102002121004

Anisa Utami, S.IP., M.A.
NIP 231704930522201

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Meiliyana'.

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

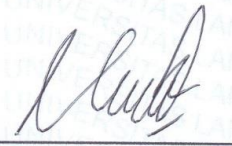
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

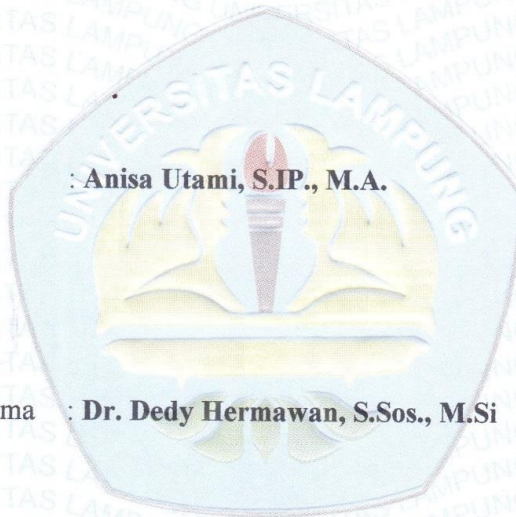
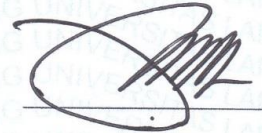
Ketua : **Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Anisa Utami, S.IP., M.A.**



Penguji Utama : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida., M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Juni 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



Oci Anggraini
NPM 1416041075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Oci Anggraini, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 09 November 1996. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Bahraini dan Ibu Supari. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Taruna Jaya, yang diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Perumnas Way Halim yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur PMPAP. Pada tahun 2017, penulis melaksanakan KKN di Desa Bumi Nabung Selatan, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa pernah mengikuti Organisasi Intra Kampus, yaitu Organisasi Himpunan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sebagai Anggota Bidang Data dan Informasi (DAIN).

MOTTO

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan maka itu awal kegagalan baginya.”

(Nabi Muhammad SAW)

“You can't always be strong, but you can always be brave.”

(Johnny Suh)

“If what you you want to do doesn't work out, keep going until you can”

(Na Jaemin)

“Let's walk slowly, enjoying every step of the journey”

(Mark Lee)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

mama dan papa tercinta

Kakak-kakakku tersayang

Terima kasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang dan segala doa untukku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta...

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. Bahraini dan Ibunda Supari. Terima kasih atas kasih sayang yang telah bapak dan mama berikan kepadaku, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AP ini aku bisa membahagiakan Mama dan Bapak yang sudah di surga, Amin.

2. Terimakasih untuk kakakku Anwar Rahmawan Saputra atas kasih sayang dan semangat yang selalu di berikan untukku sehingga aku bisa mencapai gelar S.AP.
3. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih pak atas bimbingan dan motivasi serta masukannya yang banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
4. Ibu Anisa Utami, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran dan bimbingannya yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan, saran dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
6. Ibu Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih pak atas nasehat, arahan, motivasi dan ilmu yang diberikan selama proses pendidikan hingga saat ini.
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

8. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ibu Selvi, Ibu Dewi, Ibu Devi, Ibu Dian, Ibu Novita, Ibu Imtan, Ibu Rahayu, Prof Yuli, Pak Simon, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Noverman, Pak Nana, , terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
10. Pak Johari dan Ibu Wulan selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.
11. Segenap Informan Penelitian di Dinas Perdagangan dan UPT Pasar Perumnas Way Halim: Penulis mengucapkan terimakasih kepada. Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses turlap, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku Ajeng Cindy Dewani, Nadya Khairunisa, Santi Yuliana terimakasih setiap dukungannya. Semoga setiap langkah dan hembusan nafas kalian selalu diberkahi oleh Allah SWT dan semoga setiap kebaikan dan keikhlasan kalian menjadi pahala yang berlimpah.
13. Sahabatku Inayah Andari Pangesti dan Lia Puji Apriyanti, terimakasih setiap dukungannya. Semoga setiap langkah dan hembusan nafas kalian selalu diberkahi oleh Allah SWT dan semoga setiap kebaikan dan keikhlasan kalian menjadi pahala yang berlimpah.

14. Sahabatku yang selalu menemani selama 4 tahun di jurusan Ilmu Administrasi Negara yang membantuku selama dalam masa perkuliahan membantu menjadi semangatku untuk selalu ke kampus dan tidak pernah lelah untuk selalu bersamaku yaitu Andra Diah Ayu Ningtyas, Anggi Lestari, Dian Suci Pratiwi, Heni Nur Efendi, Maya Marsita, Nadya Audyna Suprpto.
15. Sintia Gugah Asih, terimakasih mba sudah anggap saya sebagai adik sendiri dan juga selalu memberi perhatian serta dukungannya. Semoga setiap langkah dan hembusan nafas kalian selalu diberkahi oleh Allah SWT dan semoga setiap kebaikan dan keikhlasan kalian menjadi pahala yang berlimpah.
16. Gelas Antik (Adi Black, Adi kurniawan, Alvin, Ana, Andriyanto, Anggi Setiawan, Annisa Yurida, Vita, Arif, Arizal, Astri, Athiya, Bella, Binter, Daiska, Deni, Desriyanto, Desy, Dinda, Ditho, Sari, Anung, Ely, Adon, Fadly, Faiz, Fatra, Ferdian, Ferry, Gusty, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Istiqomah, Istie R, Rian, Tije, Julian, Reza, Nana, Meli, Mia, Fazry, Ma'ruf, Ara, Nabila Aisyah, Nabila Cho, Ni'mah, Nihan, Niza, Fungsi, Nur Arifah, Asih, Hasan, Idin, Laila, Okta, Rani, Refi, Regi, Rifki, Ririn, Robi, Roi, Rydho, Sandi, Sangga, Satria, Septika, Sintong, Sisca, Taufik, Tengku, Tiyasz, Trias Cininta, Triaz, Tuti, Wahyu Hidayat, Wahyu Syawaldi, Widi, Yumas,). Serta keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.
17. Terimakasih kepada Kak Karin, Kak Mustika, Kak Nisa, Addin, Nanda, Yudi yang selalu baik dan mau menemani kemanapun, yang selalu membantu

dalam hal apapun. Semangat terus ya skripsinya jangan pernah males
pokoknya, malesnya harus dilawan supaya cepet wisuda. Amin

18. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya.

Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, 29 Juni 2021

Penulis

Oci Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB PENDAHULUAN	
I	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB TINJAUAN PUSTAKA	
II	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Tinjauan tentang Kebijakan Publik	15
a. Pengertian Kebijakan	15
b. Ciri-ciri Kebijakan	16
c. Tahap-tahap Kebijakan Publik	17
2. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan Publik	19
a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik	19
b. Jenis-jenis Evaluasi Kebijakan Publik	22
c. Indikator Kriteria Evaluasi	23
3. Tinjauan tentang Dampak	30
a. Pengertian Dampak	30
Kondisi dan Dampak Sosial Ekonomi	31
b. Penilaian Dampak	34
4. Tinjauan tentang Revitalisasi	40
5. Tinjauan tentang Pasar	41
C. Kerangka Pikir	42
BAB METODE PENELITIAN	
III	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Pengambilan Sampel	55

G.	Validitas Data	55
H.	Teknik Analisis Data	56
BAB	HASIL DAN PEMBAHASAN	
IV		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1.	Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	60
2.	Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	60
3.	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	61
4.	Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	63
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	64
1.	Perencanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Way Halim	64
2.	Kondisi Pasar Perumnas Way Halim Sebelum Revitalisasi	69
3.	Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim.....	71
a.	Dampak Sosial	71
b.	Dampak Ekonomi	81
I.	Efektifitas, Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar	86
II.	Kecukupan (<i>Adequacy</i>), Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar	93
III.	Perataan (<i>Equity</i>), Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar	104
IV.	Responsivitas (<i>Responsiveness</i>), Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar	106
V.	Ketepatan (Efisiensi), Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar	113
VI.	Ketepatangunaan (<i>Appropriateness</i>), Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar	120
BAB	KESIMPULAN DAN SARAN	
V		
A.	Kesimpulan	125
B.	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....		130
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indikator Evaluasi Kebijakan	28
2. Kriteria & Definisi Evaluasi Dampak Sos-Ek-Bud-Kes Masyarakat	35
3. Daftar Informan	51
4. Daftar Dokumen Penelitian	53
5. Informasi Lantai Dasar & Jenis Dagangan	68
6. Perbandingan Fasilitas Sebelum & Sesudah Revitalisasi	70
7. Indikator Evaluasi Kebijakan	85
8. Data Pedagang Pasar Perumnas Way Halim Berdasarkan Kategori, Jumlah Pedagang serta Rata-rata Omset Harian Pasca Revitalisasi	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tahap-tahap Kebijakan Menurut William Dunn	19
2. Kerangka Pikir	45
3. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	57
4. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	62
5. Bagian Depan Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung Sesudah Revitalisasi	96
6. Peta Pembagian Zona Dagang Baru di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	97
7. Kantor Baru Unit Pelaksana Teknis Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	97
8. Perbandingan Lorong Pasar Sebelum dan Sesudah Revitalisasi	98
9. Kondisi Bagian Los/Hamparan dan Kios Baru Pedagang Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	99
10. Kondisi Tempat Sampah Bagian Pinggir dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah upaya bangsa Indonesia yang terus melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola di segala bidang, penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan maupun pedesaan sudah seharusnya terpenuhi dengan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan di kota maupun desa. Pembangunan menjadi salah satu hal penting dalam suatu tata kelola. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan memerlukan mekanisme atau metode tertentu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan suatu pedoman mekanisme, metode dan cara dalam pembangunan tersebut adalah dengan memahami kebijakan. Di dalam kebijakan ada berbagai tahap yang akan menentukan arah kebijakan atau sasaran kebijakan sehingga menjadi suatu kebijakan yang efektif dalam pembangunan (Suharto, 2008: 2).

Salah satu sektor yang menjadi pendukung dalam pembangunan adalah perekonomian. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Perkembangan perekonomian kota maupun pedesaan sangat ditentukan oleh salah satu lajunya arus sistem perdagangan yang sampai saat ini masih eksis yaitu pasar tradisional.

Menurut Damsar dalam Yulianti (2011: 3) Pasar merupakan sebuah institusi, atau tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pasar sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Definisi Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern, dimana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket*. Kemudian definisi Pasar Tradisional menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah, pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar tradisional sebagai salah satu sarana kegiatan perekonomian masyarakat yang memiliki nilai strategis dalam mendukung perkembangan dunia usaha dan sekaligus dalam memajukan perekonomian masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Pasar

Modern memiliki definisi toko dengan sistem pelayanan mandiri, yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departmenet store*, *hipermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasar tradisional sendiri merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern, yaitu lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang tersedia, harga barang yang terjangkau, serta adanya sistem tawar-menawar yang menunjukkan kontak sosial dan keakraban antara penjual dan pembeli. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak ekonomi kalangan menengah kebawah dan jelas memberikan efek yang baik bagi negara jika pengelolaan dan pengembangan dilakukan dengan cara yang tepat. Namun selain memiliki keunggulan, pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan atau pemasalahan yang umumnya terjadi, seperti kondisi pasar yang buruk dari segi fisik (bangunan yang kurang terawat, serta becek dan bau), faktor keamanan yang lemah, resiko penjual yang melakukan kecurangan pada timbangan terhadap barang yang akan dijual, penuh sesak, serta lemahnya manajemen pengelolaan pasar. Saat ini posisi pasar tradisional di perkotaan semakin tersudut akibat maraknya pembangunan pasar modern yang memiliki kesan lebih baik dan bagus dalam segi fisik, fasilitas sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaannya.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan di pasar tradisional setempat. Terdapat empat (4) fungsi ekonomi yang dapat diperankan pasar tradisional,

menurut Blokosuto, dalam Endrawanti (2012), yaitu: 1) Pasar tradisional merupakan tempat dari berbagai lapisan masyarakat memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena terbukti seringkali relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di pasar modern. Dengan kata lain bahwa pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi bagi masyarakat kecil, 2) Merupakan tempat yang relatif bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas, terutama yang bermodal kecil, 3) Merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang, dan 4) Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat ekonomi baik skala lokal, regional maupun nasional. Selain empat fungsi ekonomi tersebut, pasar juga mempunyai fungsi sosial yaitu, pasar tradisional merupakan ruang untuk saling bertemu muka, dan menjadi tempat bagi masyarakat, terutama dari kalangan bawah untuk melakukan interaksi sosial dan tukar informasi atas segenap permasalahan yang mereka hadapi. Namun dibalik peran strategis serta fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah pasar tradisional tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan perhatian pembuat kebijakan dan pengelola yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional.

Citra pasar tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena di dalamnya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggungjawab kepada publik, mengingat pasar tradisional telah banyak berperan dalam pembangunan sosial ekonomi sehingga perlu mendapatkan

perhatian agar perannya tetap ada dalam dunia perekonomian. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan pasar modern, maka pemerintah melakukan upaya-upaya perbaikan pasar-pasar tradisional di perkotaan melalui program revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar tradisional dapat dilakukan dengan menata kembali dan membenahi pasar tradisional, sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan, karena pasar tradisional tetaplah pasar tradisional dengan berbagai aktivitasnya yang khas, dan pengelolaannya yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga kebersihan dan kenyamanan pasar menjadi sebuah prioritas.

Revitalisasi, yang dalam hal ini adalah melakukan perbaikan atau pembangunan ulang terhadap bangunan pasar lama tertuang dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu pemerintah daerah perlu: a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelolaan pasar tradisional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di bab II bagian pertama yaitu Penataan Pasar Tradisional pasal 2 telah dijelaskan bahwa;

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya,

2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan,
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional, dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anatar pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bab II (dua) berisi tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang meliputi; a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah, dan d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Perencanaan pengelolaan pasar tradisional juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, bab III Pengelolaan, bagian kesatu Perencanaan yaitu; (1) Bupati/Walikota melalui kepala SKPD melakukan

perencanaan pasar tradisional, (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat. Program yang telah dirintis Kementerian Perdagangan sejak tahun 2004 hingga sekarang ini diharapkan mampu membuat pasar tradisional bersaing dengan pasar modern yang perkembangannya makin pesat, Pasar tradisional sebagai pusat pembangunan perekonomian, diharapkan mampu bertahan bahkan terus berkembang menghadapi dunia persaingan untuk merebut konsumen. Pembenahan pasar tradisional tentu bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat. Konsep revitalisasi pasar tidak hanya sebatas dengan perubahan fisik atau pembaharuan bangunannya saja, tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar.

Revitalisasi dapat dilaksanakan apabila semua pihak yang terkait saling mendukung, baik pihak pemerintah, pedagang hingga pembeli. Aspek fisik, aspek ekonomi serta aspek sosial menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan revitalisasi. Kenyamanan dalam aktivitas ekonomi merupakan target yang ingin dicapai, sehingga diharapkan akan memberi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya revitalisasi adalah mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Keberadaan pasar tradisional sudah saatnya dilestarikan untuk menunjang pembangunan perekonomian dari masing-masing daerah. Tata kelola pasar yang menjadi titik lemah harus diperbaiki untuk menambah jumlah konsumen dan meningkatkan kenyamanan berbelanja di pasar tradisional.

Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dari adanya program Revitalisasi Pasar yaitu guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat, serta untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman khususnya di salah satu Pasar Tradisional yang ada di Kota Bandarlampung yaitu Pasar Perumnas Way Halim, maka pemerintah perlu memperhatikan bagaimana dampak yang timbul akibat adanya suatu kebijakan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga yang diantaranya ada yang diharapkan dan tidak diharapkan atau yang dimaui dan tidak dimaui (Samodra, 1994: 30).

Seiring dengan dilaksanakannya program Revitalisasi Pasar di Pasar Perumnas Way Halim Bandarlampung, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dampak sosial ekonomi program Revitalisasi yang difokuskan untuk melihat dampak setelah program Revitaliasasi tersebut diimplementasikan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana dampak yang sesungguhnya terjadi, apakah sesuai dengan dampak yang diharapkan atau tidak. Namun tetap memperhatikan hasil dari program Revitalisasi yakni seberapa besar program Revitalisasi mampu menghilangkan citra buruk pasar tradisional yang dikenal kurang terawat, serta apakah ada peningkatan kualitas dalam sistem manajemen pengelolaan pasar di salah satu Pasar Tradisional yang ada di Kota Bandarlampung yaitu Pasar Perumnas Way Halim. Diharapkan dengan penelitian ini peneliti dapat mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara dampak yang diharapkan dengan dampak yang sesungguhnya terjadi, sehingga nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan tersebut di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas, peneliti terdorong untuk memperoleh kejelasan yang lebih detail mengenai kondisi sosial ekonomi para pedagang dan masyarakat sekitar lokasi pasar serta agar dapat memberikan gambaran yang nyata tentang fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai dampak yang terjadi akibat Program Revitalisasi tersebut. Dengan memperhatikan permasalahan diatas serta melihat data-data yang ada, maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan judul **“Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak sosial yang timbul akibat program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim?
2. Bagaimana dampak ekonomi yang timbul akibat program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial yang timbul akibat program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak ekonomi yang timbul akibat program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait dengan proses implementasi kebijakan yang mengacu pada pembangunan dan perbaikan di sektor ekonomi khususnya revitalisasi pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan khususnya perdagangan di Kota Bandarlampung. Dan menambah wawasan tentang bagaimana dampak sosial ekonomi dari revitalisasi pasar serta mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan sehingga mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah. Lalu dapat menjadi referensi tambahan terhadap bahan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai dampak sosial ekonomi program revitalisasi pasar di Pasar Perumnas Way Halim Bandarlampung. Adapun contoh-contoh penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Arif Kisbiyanto (2013) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Modern pada Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Kota Boyolali)”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak sosial ekonomi keberadaan pasar modern pada pasar tradisional khususnya Pasar Kota Boyolali serta faktor-faktor apa yang membuat pengunjung tetap loyal memilih berbelanja di Pasar Kota Boyolali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai dampak sosial ekonomi yang terjadi dalam suatu lingkup pasar. Namun terdapat perbedaan antara penelitian Arif Kisbiyanto dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, Arif Kisbiyanto fokus meneliti mengenai dampak sosial ekonomi keberadaan pasar modern pada pasar tradisional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

adalah dampak sosial ekonomi dari sebuah program pemerintah yaitu Revitalisasi Pasar Tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat, serta untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman.

2. Aditya Debby Ayoga (2015) mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Masaran Cawas (Studi Kasus di Pasar Masaran Cawas, Kabupaten Klaten)”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal, pengalaman dagang jumlah tenaga kerja, pendidikan dan biaya terhadap pendapatan pedagang di Pasar Masaran Cawas, serta untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah revitalisasi di Pasar Masaran Cawas. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aditya Debby Ayoga dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama untuk mengetahui dampak yang timbul dari revitalisasi sebuah pasar tradisional. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan yang akan oleh penulis lakukan adalah, penelitian Aditya Debby Ayoga lebih difokuskan pada studi ekonomi yaitu dengan melihat pengaruh modal, pengalaman dagang, jumlah tenaga kerja serta biaya terhadap pendapatan pedagang di Pasar Masaran Cawas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada bagaimana kebijakan dari sebuah program mempengaruhi kondisi sosial ekonomi para pelaku ekonomi di masyarakat khususnya di salah satu Pasar Tradisional yang ada di Bandarlampung yaitu Pasar Perumnas Way Halim.

3. Muhammad Hafid Zakni (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Minat Beli Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pasar Tradisional Kangkung, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandarlampung)”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program revitalisasi pasar tradisional kangkung, serta bagaimana dampak implementasi program revitalisasi terhadap pendapatan pedagang dan minat beli konsumen, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana program revitalisasi pasar tradisional kangkung dalam perspektif ekonomi islam. Persamaan penelitian Muhammad Hafid Zakni dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mendeskripsikan bagaimana implementasi program revitalisasi pasar tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi para pelaku ekonomi di lingkungan pasar tradisional tersebut. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafid Zakni ini juga menggunakan pedoman dalam perspektif ekonomi islam dalam menganalisis implementasi program revitalisasi pasar tersebut, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak menggunakan perspektif ekonomi islam.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1978; 1987:1) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Definisi lain dikemukakan oleh Wilson (2006: 154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai “*the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and explanations they give for what happens (or does not happen)*” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)). Kemudian Pakar Prancis, Lemieux (1995: 7) merumuskan kebijakan publik sebagai “*the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process involves over time*” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu (Solichin Abdul Wahab, 2014: 13-15).

Keluaran kebijakan merupakan wujud kebijakan publik yang agaknya paling konkret. Keluaran kebijakan dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

Keluaran kebijakan menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah, yang harus kita bedakan dari apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain;

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- 3) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu,

- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

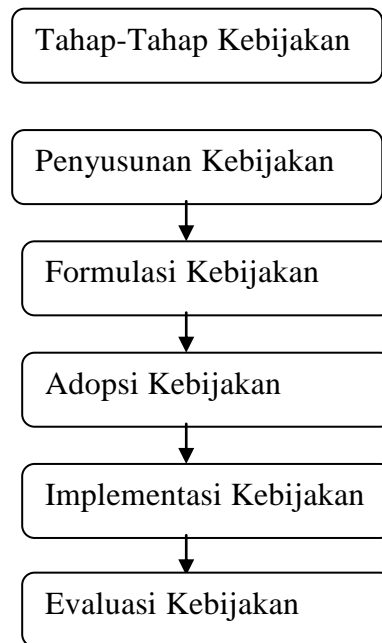
c. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Beberapa ahli membagi tahap-tahap atau proses kebijakan dengan urutan berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyusunan Agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- 2) Tahap Formulasi Kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

- 3) Tahap Adopsi Kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
- 4) Tahap Implementasi Kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- 5) Tahap Evaluasi Kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini;
Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan menurut William Dunn.



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34).

2. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkat dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program berjalan dengan baik atau tidak. Pada dasarnya, kebijakan publik dilaksanakan dengan maksud tertentu untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dye menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai (Parsons, 2011: 547). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan, seringkali kebijakan publik tersebut gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi dapat mengemban fungsi pembelajaran, dalam artian bahwa dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mengantarkan pada hasil yang diharapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan dimungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan datang dan dengan demikian menghindarkan kesalahan yang telah dibuat di masa lalu (Wahab, 1997: 11).

Menurut Dunn (2003: 609-610), fungsi evaluasi terdiri dari:

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”. Berdasarkan pendapat Dunn tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu;

1. Fokus nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan,
2. Interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu,
3. Orientasi masa kini dan masa lampau, tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu dibandingkan hasil di masa depan, sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut,
4. Dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain (Dunn, 2003: 608-609).

Evaluasi juga memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut;

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengukuran atau *output* dari suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan di masa depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Subarsono, 2006: 120).

b. Jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Bingham dan Felbiger (Nugroho, 2011: 676) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis yaitu;

- 1) Evaluasi proses, yang berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan,
- 2) Evaluasi dampak, yang berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan,
- 3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan,
- 4) Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait.

Menurut James Anderson, evaluasi kebijakan publik dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan

yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan tercapai (Nugroho, 2011: 675). Berdasarkan 3 tipe evaluasi kebijakan yang diungkapkan James Anderson diatas, maka di dalam penelitian ini lebih ditekankan pada tipe ketiga, sehingga evaluasi dapat secara terfokus melihat dan mengukur dampak program Revitalisasi khususnya terhadap kondisi sosial ekonomi.

c. Indikator atau Kriteria Evaluasi

Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan melalui beberapa indikator. Secara umum, Dunn mendeskripsikan kriteria-kriteria atau indikator evaluasi kebijakan publik sebagai berikut;

1. Efektivitas

Menurut Dunn (2003:429) mengatakan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya, sedangkan menurut Winarno (2002: 184) mengatakan bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pendapat lain datang dari Suharno (2013:223) mengatakan bahwa efektivitas menekankan pada ketercapaian hasil, apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.

2. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn (2003:430) mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kemudian Suharno (2013:223) mengatakan bahwa kecukupan lebih mempersoalkan kememadaiannya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Dunn (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- Masalah tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas sumber yang tersedia.
- Masalah tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- Masalah tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- Masalah tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan

karena satu-satunya alternative kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

3. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisiensi, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Kemudian Suharno (2013:223) mengatakan bahwa pemerataan menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

4. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan

dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kemudian Suharno (2013: 223-224) mengatakan bahwa responsivitas lebih menekankan kepada aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak.

Dunn (2003:437) pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan dan ketepatan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

5. Efisiensi

Menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Pendapat lain menurut Suharno (2013:223) mengatakan bahwa efisiensi memfokuskan pada persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

6. Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Ketepatan

merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn (2003:499) menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Pendapat lain datang dari Winarno (2002: 184) mengatakan bahwa ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Suharno (2013:224) yang mengatakan bahwa ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Kebijakan

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2.	Kecukupan (<i>Adequacy</i>)	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3.	Pemerataan (<i>Equity</i>)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5.	Ketepatan atau efisiensi	Apakah hasil yang tercapai bermanfaat?
6.	Ketepatangunaan atau <i>Appropriateness</i>	Apakah kebijakan tersebut tepat dan benar-benar berguna untuk suatu masyarakat?

Sumber: Dunn dalam Subarsono, 2005: 126.

Berdasarkan uraian indikator dari evaluasi di tabel 1, bahwa peneliti hanya memilih indikator evaluasi berdasarkan; efektivitas, efisiensi dan responsivitas karena dalam tiga indikator tersebut sudah sangat membantu peneliti dalam mengevaluasi dan menentukan apa saja dampak sosial ekonomi yang timbul akibat dari program Revitalisasi yang diterapkan di Pasar Perumnas Way Halim, dimana pada evaluasi biasanya menekankan pada hasil yang sudah dicapai dan dimana tiga indikator ini juga menekankan pada hasil dari evaluasi yang akan diteliti pada judul Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandarlampung).

Kemudian dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz terdapat 4 jenis evaluasi yaitu: (1) *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program; (2) *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung; (3) *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak

untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya; (4) *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran (dalam Samudro dkk, 1994: 10). Berdasarkan jenis-jenis studi evaluasi yang mengacu pada teori evaluasi menurut Fintersbuch dan Motz di atas, dalam penelitian ini menggunakan jenis evaluasi yang keempat, yakni *comparative before-after*, pilihan ini berdasarkan pada alasan bahwa penelitian ini menganalisis efek atau dampak program terhadap kelompok sasaran (pedagang di Pasar Perumnas Way Halim) dan kelompok kontrol (pedagang yang terkena program revitalisasi pasar). Sedangkan *before-after*, berarti analisis ini dilakukan dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan program Revitalisasi.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi sebagai berikut:

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati,
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan,
3. *Auditing*, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai pada kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan,
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut (Samodra, 1994: 10).

Dalam hal ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap dampak yakni dengan melihat dari jenis evaluasi *comparative program before-after* yang merupakan kombinasi ketiga desain dengan dukungan data sebelum dan sesudah program dilaksanakan sehingga informasi yang diperoleh adalah efek atau dampak program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol. Dan menggunakan indikator berdasarkan tipe evaluasi menurut William Dunn yakni: efektifitas, efisiensi, dan responsivitas.

3. Tinjauan tentang Dampak

a. Pengertian Dampak

Dampak menurut Garys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998: 35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1998: 43), menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.

Dampak menurut JE. Hosio (2007: 57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan perubahan yang nyata akibat dari dikeluarkannya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari

dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

- **Kondisi dan Dampak Sosial Ekonomi**

Pengertian sosial dalam ilmu sosial merujuk pada objek yaitu masyarakat, sedangkan pada departemen sosial merujuk pada kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan terkait dengan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti juga segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan secara garis besar ekonomi dapat diartikan sebagai peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat atau yang lebih umumnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat (Zunaidi, 2013: 54).

Kondisi sosial yaitu kondisi tertentu dimana berlangsung hubungan antara individu yang lain atau terjadi saling berhubungan antara dua individu atau lebih. Sedangkan kondisi ekonomi merupakan kondisi dimana masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi dan sosial para pedagang pasar Perumnas Way Halim ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu: 1) Pedagang profesional, yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga, 2) Pedagang semi profesional, yaitu pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonominya, 3) Pedagang

subtensi, yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitasnya atas subtensi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, 4) Pedagang semu, yaitu orang atau pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. (Mudhito, 2012: 10). Berdasarkan keterangan di atas, kondisi sosial dan ekonomi para pedagang pasar Perumnas Way Halim mayoritas terdiri dari pedagang profesional. Hal ini dikarenakan aktivitas mereka dihabiskan di dalam pasar dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ekonomi mereka bergantung dari hasil berdagang di pasar Perumnas Way Halim yang dijadikan sebagai pekerjaan utama.

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Beberapa hal yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal (Sinaga, 2004: 134). Teori Webber mengemukakan bahwa tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Sebab secara umum, dikalangan pedagang pasar tradisional terdapat interaksi sosial, hubungan sosial dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka (Heriyanto, 2012).

Setiap perubahan membawa konsekuensi tersendiri bagi masyarakat. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, seiring berjalannya waktu tentu tidak terlepas dari dampak yang menyertainya. Pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud

dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya (Soekanto: 1982). Dampak-dampak yang muncul tersebut dapat ditarik sebuah benang merah yakni adanya intervensi yang datang dari *decision-making* yang berpengaruh atas kondisi sebelum dan sesudahnya (Parsons, 2006). Perspektif dampak dalam tinjauan sosiologi harus memperhatikan beberapa hal dalam kehidupan sosial. Aspek sosial dalam kajian dampak yang dibingkai oleh terapan ilmu pengetahuan sosial secara sistematis ini, setidaknya untuk mengidentifikasi dua hal: (1) bentuk dan sifat penilaian atau respon masyarakat terhadap suatu usaha atau kegiatan; dan (2) perubahan penilaian atau respon masyarakat terhadap usaha atau kegiatan tersebut. Pembahasan masalah tersebut mencakup rentang kegiatan yang meliputi tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan pascakonstruksi, dengan memperhatikan tujuan dan target yang hendak dicapai (Usman: 2003). Dan dalam penelitian ini pembahasan masalahnya adalah pascakonstruksi atau pasca program revitalisasi pasar dilakukan.

b. Penilaian Dampak

Seperti di definisikan oleh Rossi dan Freeman (1993: 215):

Penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi—yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang di evaluasi itu.

Penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi *problem* dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja/tidak bekerja”, memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi *problem* dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Sedangkan metode untuk menilai dampak antara lain; a) Membandingkan *problem/situasi/kondisi* dengan apa yang terjadi sebelum intervensi, b) Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi, c) Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi, d) Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu, e) Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program, f) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan, g) Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi (Parsons, 2011: 604).

Dalam beberapa hal, prakiraan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat tidak dapat diukur secara kuantitatif, maka ada beberapa kriteria dan definisi dampak yang secara khusus digunakan dalam evaluasi dampak penting hipotetik aspek sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan masyarakat. Terdapat enam (6) kriteria utama menentukan kualitas dampak: a) Jumlah populasi yg beresiko terkena dampak, b) Luas sebaran dampak, c) Intensitas dan lama dampak berlangsung, d) Komponen lain yang terkena

dampak, e) Sifat kumulatif dampak, f) Sifat berbalik tidaknya dampak. Kriteria dan definisi dampak yang secara khusus digunakan dalam evaluasi dampak penting hipotetik aspek sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan masyarakat dikemukakan pada tabel dibawah ini

Tabel 2. Kriteria dan Definisi yang khusus digunakan dalam Evaluasi Dampak Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat.

Kriteria Dampak	Definisi
Sifat Dampak	
Dampak negatif	Dampak dalam bentuk terjadinya perubahan terhadap rona lingkungan menjadi lebih buruk dari kondisi semula.
Dampak positif	Dampak dalam bentuk terjadinya perubahan terhadap rona lingkungan menjadi lebih baik dari kondisi semula.
Jenis Dampak	
Dampak langsung (primer)	Dampak yang ditimbulkan oleh interaksi secara langsung antara aktivitas proyek yang direncanakan dengan komponen lingkungan penerima dampak
Dampak turunan (sekunder, tersier dan seterusnya)	Dampak terhadap komponen lingkungan merupakan dampak turunan dari dampak primer berupa dampak sekunder, tersier dan seterusnya
Dampak tidak langsung	Dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas lain, di mana aktivitas lain ini muncul sebagai akibat keberadaan proyek
Dampak kumulatif	Dampak dari suatu kegiatan berlangsung bersama dengan dampak dari kegiatan lainnya terhadap reseptor (manusia atau satwa) atau sumber daya (komponen lingkungan geofisika-kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya) pada ruang dan waktu yang sama
Dampak sisa	Dampak yang masih tersisa setelah pengelolaan direncanakan akan dilakukan terhadap aktivitas penyebab dampak.
Lama Dampak Berlangsung	
Sementara	Berlangsung dalam kurun waktu 0-1 tahun
Jangka Pendek	Berlangsung dalam kurun waktu 1-5 tahun
Jangka Panjang	Berlangsung dalam kurun waktu 5-30 tahun
Permanen	Berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun dan bersifat tidak berbalik (<i>irreversible</i>)
Persebaran Dampak	
Lokal	Dampak berlangsung di lokasi proyek, sejauh beberapa hektar dan kampung-kampung di dekat lokasi proyek
Regional	Dampak berpengaruh sampai ke tingkat Kabupaten dan Provinsi
Global	Dampak berpengaruh sampai tingkat nasional dan menjadi perhatian internasional
Besaran Dampak (<i>Impact Magnitude</i>)	
Diabaikan	Besaran dampak (diabaikan, kecil, sedang, besar) ditentukan dari kombinasi beberapa aspek dibawah ini: 1. Sifat dampak 2. Ukuran dampak dan Intensitas dampak
Kecil	
Sedang	
Besar	

	3. Persebaran dampak 4. Lama dampak berlangsung
Intensitas Dampak	
Rendah	Dampak terjadi kurang dari satu kali dalam satu bulan (satu kali per dua bulan, dan seterusnya)
Sedang	Dampak terjadi satu kali dalam satu bulan
Tinggi	Dampak terjadi dua kali dalam satu minggu
Sangat tinggi	Dampak terjadi setiap hari
Sensitivitas Penerima Dampak	
Rendah	Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan sensitivitas penerima dampak adalah apakah penerima dampak adalah lingkungan geofisika-kimia, biologi maupun manusia:
Sedang	
Tinggi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila penerima dampak adalah lingkungan geofisika-kimia (misalnya badan perairan) maka kualitas, tingkat penting dan sensitivitasnya terhadap perubahan dijadikan bahan pertimbangan, • Apabila penerima dampak adalah lingkungan biologi maka tingkat penting (misalnya tingkat penting untuk lokal, regional atau global) dan sensitivitasnya terhadap dampak dijadikan bahan pertimbangan, • Apabila penerima dampak adalah manusia maka tingkat sensitivitas komunitas masyarakat (kelompok sosial) akan dijadikan bahan pertimbangan termasuk kemampuan adaptasi dan mengelola pengaruh dari dampak yang timbul. <p>Faktor lainnya yang dipertimbangkan dalam sensitivitas komponen lingkungan penerima dampak yaitu status proteksi secara hukum, kebijakan pemerintah, nilai ekonomi dan pendapat pemangku kepentingan</p>

Sumber: ANDAL Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG (III-5)

Dalam kajian dampak, penetapan komponen sosial-ekonomi relatif lebih sulit karena sifat manusia yang sangat dinamis dan setiap komponen mempunyai hubungan yang erat dan interaktif. Beberapa komponen-komponen sosial ekonomi yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi masyarakat tidak terlepas dari jaringan pola-pola perkembangan tersebut (Suratmo, 2004: 108-109). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, kondisi sosial ekonomi adalah kondisi seseorang yang dapat diukur dari pendidikannya, pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain yang sekiranya dapat dirumuskan kerangka operasi dari dampak, baik positif maupun negatif, yang dirasakan oleh kelompok pedagang

baik yang bersifat permanen maupun kontemporer pasca pelaksanaan revitalisasi di pasar Perumnas Way Halim yang dilihat dari sudut pandang;

a. Sosial:

Menyangkut aspek-aspek relasi dan interaksi sosial para pedagang baik sebagai individu maupun kelompok, serta baik yang berlaku pada tataran struktural maupun kultural dengan elemen-elemen sosial lainnya yang menyangkut berjalannya kehidupan pasar, dan lain-lain.

1. Persepsi Masyarakat atau Pendapat Umum

Menurut Walgito (2002:94) Persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh oleh seseorang, kemudin disimpulkan dan diatfsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selam amnesia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita berinteraksi dengan lingkungan akan memberi respon atau reaksi, baik berupa tingkah laku, pendapat, sikap atau ide menurut intervensi masing-masing individu. Persepsi atau tanggapan yang diberikan masing-masing individu tidak akan selalu sama meskipun dilakukan pada saat yang bersamaan, sehingga setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.

2. Interaksi Sosial dalam Pasar

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga saat manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka pasti memerlukan kehadiran orang lain agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, karena itulah manusia perlu melakukan interaksi sosial antar sesamanya. Menurut Sardiman, dkk (2008: 48) Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang per orang, kelompok-

kelompok manusia, dan antara orang perorangan dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Tujuan interaksi sosial, antara lain: Menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan usaha, mendiskusikan sebuah persoalan, serta melakukan kerjasama.

Bentuk Interaksi Sosial

a. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Soekanto dalam Irawan, 2015: 26). Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.

b. Persaingan

Persaingan merupakan suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan (Soekanto dalam Irawan, 2015: 27).

c. Pertentangan (Konflik)

Pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto dalam Irawan, 2015: 27).

3. Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan

bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 1999: 122). Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum maupun yang belum tercantum pada undang-undang pidana).

b. Ekonomi:

Menyangkut aspek-aspek penyerapan tenaga kerja, perkembangan struktur ekonomi, perubahan pendapatan masyarakat, dan perubahan lapangan pekerjaan yang ada, dan lain-lain.

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor terpenting bagi setiap manusia di dunia ini dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu usaha untuk membiayai semua kegiatan yang mendukung keberlanjutan suatu usaha sangat berpengaruh dengan seberapa besar pendapatan usaha tersebut diperoleh.

Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa. Pendapatan atau dapat disebut dengan keuntungan ekonomi merupakan pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi biaya produksi (Sukirno, 2005: 37). Pendapatan juga dapat disebut *income* (masukan) dari seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi jual-beli dan pendapatan diperoleh apabila transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga bersama.

2. Minat Beli

Menurut Thomas dalam Yeni (2010: 34), minat beli adalah tahapan kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Sedangkan menurut Nugroho (2013: 342) menjelaskan bahwa minat beli adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini ialah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Dari kedua pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen adalah kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum memutuskan membeli suatu barang.

4. Tinjauan tentang Revitalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses

revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas.

5. Tinjauan tentang Pasar

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik No. 112 Tahun 2007, pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Brian Berry dalam bukunya *Geography of Market* (dalam Endrawanti, 2012: 80) menyatakan bahwa pasar adalah tempat dimana terjadi proses tukar menukar. Proses ini terjadi bila ada komunikasi antara penjual dan pembeli dan diakhiri dengan keputusan untuk membeli barang tersebut. Pasar akan selalu mengalami perubahan terutama secara fisik, mengikuti tingkah laku penggunanya.

Dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan suatu tempat jual beli berlangsung dimana pasar terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi.

Pasar dibedakan menjadi 2 berdasarkan cara transaksinya, yaitu:

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, pembeli dilayani langsung oleh penjual dan dapat melakukan tawar-menawar secara langsung. Contoh Pasar Kangkung di Bandar Lampung, pasar Bringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan sebagainya.

2. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang melakukan pelayanan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga. Contoh *Giant, Lottemart* dan sebagainya.

C. Kerangka Berpikir

Pasar tradisional merupakan salah satu indikator nyata dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan pasar modern yang semakin marak tentu akan mengancam keberadaan pasar tradisional. Keadaan pasar tradisional yang memiliki citra kurang baik seperti kumuh, kotor serta tidak rapi tentu perlu untuk dibenahi atau direvitalisasi, hal ini bertujuan agar pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;

fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

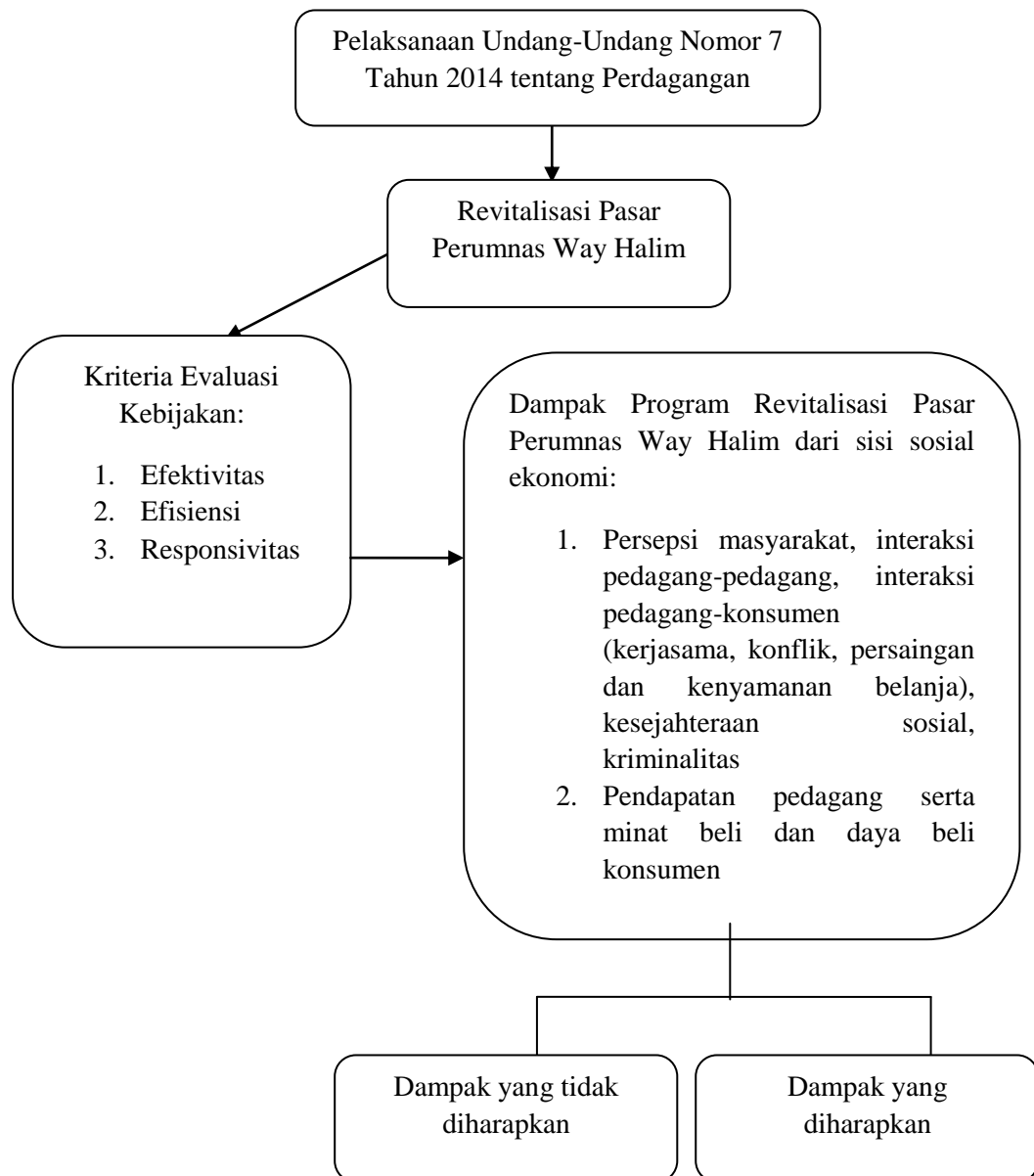
Kota Bandarlampung memiliki beberapa pasar tradisional yang perlu dibenahi, salah satunya Pasar Perumnas Way Halim yang telah berdiri sejak tahun 1983. Salah satu faktor mengapa revitalisasi perlu dilakukan di Pasar Perumnas Way Halim adalah karena kondisi pasar yang tidak lagi layak secara infrastruktur, oleh karena itulah pemerintah melakukan revitalisasi pasar ini yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan pedagang dan kepuasan konsumen yang berbelanja di Pasar Perumnas Way Halim. Pembangunan kembali pasar ini telah selesai sejak desember 2017 lalu, dan pada februari 2018 para pedagang mulai menempati kembali pasar karena pembangunan telah selesai dilakukan, dengan kondisi infrastruktur pasar yang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya karena telah dilakukan pembenahan dari segi fisik dan juga pengaturan zona dagang sesuai dengan jenis dagangannya.

Namun dalam pelaksanaan sebuah program, pasti memiliki dampak yang akan berpengaruh terhadap kelompok sasaran. Dalam hal ini, pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional pastilah akan berdampak pada para pedagang, konsumen serta para pelaku ekonomi yang berada di lingkungan sekitar pasar. Dampak yang biasanya akan timbul adalah dampak sosial dan ekonomi. Dari program revitalisasi pasar ini terdapat dampak sosial ekonomi yang diharapkan serta yang tidak diharapkan. Dengan penelitian ini peneliti dapat mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara dampak yang diharapkan dengan dampak yang sesungguhnya terjadi.

Penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap dampak yakni dengan melihat dari jenis evaluasi *single program before-after* yang merupakan adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan sesudah program berlangsung. Dan menggunakan keenam indikator evaluasi yang diungkapkan menurut William Dun yaitu, efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, ketepatan, dan responsivitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak sosial ekonomi dari program revitalisasi pasar tradisional yang diterapkan di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandarlampung terhadap pedagang, konsumen serta pelaku ekonomi yang berada di sekitar pasar dengan menggunakan parameter indikator berdasarkan tipe evaluasi menurut William Dunn yang telah dijelaskan diatas. Dengan demikian maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan peneliti dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2. Kerangka Berpikir.



Sumber : diolah oleh peneliti, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Moleong (2005: 3) berpendapat bahwa deskriptif adalah menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Moleong (*op.cit*: 6) juga mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka peneliti diharapkan dapat memaparkan gambaran tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kejadian empiris mengenai dampak sosial ekonomi yang sebenarnya dalam pelaksanaan kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dengan studi pada Pasar Perumnas Way Halim yang bertempat di Perumnas Way Halim Bandarlampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moleong (2000), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik. Wayne Parson (*op.cit*: 548) juga menyatakan bahwa riset evaluasi membahas dua dimensi: bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak sosial dari kebijakan. Pengamatan dalam penelitian ini difokuskan pada:

A. Sosial:

1. Persepsi Masyarakat atau Pendapat Umum
2. Interaksi Sosial dalam Pasar:
 - a. Kerjasama
 - b. Persaingan
 - c. Pertentangan (Konflik)
3. Kesejahteraan Sosial

4. Kriminalitas

B. Ekonomi:

1. Pendapatan
2. Minat Beli

Adapun fokus yang telah disebutkan diatas, dalam penelitian ini berkaitan dengan evaluasi dari Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandarlampung) melalui indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn sebagai berikut :

1. Efektivitas, yaitu untuk mengetahui apakah program revitalisasi pasar yang telah dilaksanakan di Pasar Perumnas Way Halim sudah terlaksana dengan baik dengan melihat tujuan dan capaian yang diinginkan?
2. Kecukupan, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
3. Perataan, yaitu untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu ?
4. Efisiensi, yaitu untuk mengetahui sumber daya manusia maupun finansial dari program program revitalisasi pasar yang telah dilaksanakan di Pasar Perumnas Way Halim, dengan melihat biaya dan waktu yang digunakan.
5. Responsivitas, yaitu untuk mengetahui apakah kebutuhan masyarakat terpenuhi dan apakah program tersebut memuaskan bagi kelompok sasaran.
6. Ketepatangunaan, yaitu untuk mengetahui apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang relevan dan mendukung proses penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Perumnas Way Halim yang terdiri dari para pedagang serta konsumen serta UPT Pasar Perumnas Way Halim Bandarlampung. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dikarenakan, Kota Bandarlampung masih memiliki banyak pasar tradisional yang masih kurang terawat dari segi fisik atau bangunan serta tata kelola yang belum maksimal, yang mengakibatkan pasar tradisional di Kota Bandarlampung mengalami penurunan peminat konsumen dikarenakan kondisi pasar yang kurang terawat, berdasarkan data yang ada, hampir seluruh pasar tradisional mengalami permasalahan seperti pasar yang tidak terawat. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di UPT Pasar Perumnas Way Halim Bandarlampung yaitu dikarenakan Unit Pelaksana Teknis tersebut memiliki wewenang serta diberikan tanggung jawab oleh pemerintah Kota Bandarlampung melalui Dinas Perdagangan Kota Bandarlampung untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, serta Unit Pelaksana Teknis ini juga yang berkewajiban untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis atau pelaksana lapangan yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan pasar. Kemudian alasan penulis mengambil sampel pasar tradisional perumnas way halim dikarenakan pasar tradisional tersebut menjadi salah satu dari sekian banyaknya pasar tradisional di Bandarlampung yang mengalami permasalahan pasar yang tidak teratur serta tidak terawat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai salah satu yang berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta, fakta tersebut ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian (Bungin, 2013: 123). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang membantu mendeskripsikan fokus dari penelitian ini

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Bungin, 2013: 128). Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan hasil observasi dari narasumber atau informan yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan data yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi program revitalisasi pasar tradisional khususnya pasar perumnas way halim di Bandar Lampung. Data yang diperoleh dari data primer kemudian diolah kembali oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder berupa internal data dan eksternal data (Bungin, 2013: 128). Data sekunder yang akan peneliti dapat adalah data yang berasal dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti artikel, jurnal, peraturan pemerintah, undang-undang. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah kembali.

2. Sumber Data

Lofland dan lofland (1984) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007: 157). Dari penjelasan tersebut, dapat diuraikan bahwa kata-kata yang dimaksud adalah data yang berasal dari proses wawancara terhadap informan sedangkan tindakan yang dimaksudkan adalah data yang berasal dari hasil observasi peneliti di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini, antara lain :

a. Informan

Informan adalah seseorang yang dianggap memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan data yang relevan dengan masalah diteliti atau seseorang yang dianggap memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Parlindungan Pane	Kepala UPT Pasar Perumnas Way Halim
2.	Yuli	Pedagang Sayur-sayuran
3.	Erna	Pedagang Sayur-sayuran
4.	Isti	Pedagang Buah
5.	Emah	Pedagang Buah
6.	Arman	Pedagang Bumbu Dapur
7.	Nasir	Pedagang Daging Sapi
8.	Ujang	Pedagang Daging Sapi
9.	Ari	Pedagang Ikan Giling
10.	Sari	Pedagang Pakaian
11.	Yuli	Pedagang Pakaian
12.	Pipit	Pedagang Warung Makan
13.	Sugeng	Pedagang Sembako
14.	Joko	Pedagang Sembako
15.	Hamrin	Pedagang Sandal dan Sepatu
16.	Rasyid	Pedagang Daging Ayam
17.	Ginting	Pedagang Ikan Segar/Hewan Laut

18.	Ani	Pedagang Ikan Segar/Hewan Laut
19.	Anisa	Pedagang Kue/ Makanan Ringan
20.	Eliana	Pedagang Kosmetik
21.	Cecep	Pedagang Pecah Belah dan Plastik
22.	Aras	Pedagang Emas dan perhiasan lainnya
23.	Mira	Pedagang Peralatan rumah tangga
24.	Nur	Konsumen
25.	Desy	Konsumen
26.	Yanti	Konsumen
27.	Mul	Petugas Kebersihan

Sumber dioleh peneliti tahun 2018

b. Hasil Observasi

Data yang diperoleh melalui observasi adalah hasil pengamatan peneliti secara langsung terhadap situasi dan tingkah laku obyek yang berada di lapangan. Hasil pengamatan ini akan membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah setiap bahan tertulis yang berisi tentang informasi yang berkaitan serta mendukung penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 4. Daftar Dokumen Penelitian

No.	Nama Dokumen
1.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
3.	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sumber: Diolah oleh penelliti, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini hal yang terpenting adalah mengumpulkan data dari hasil-hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan, dan menyusunnya agar kita memperoleh data. Penelitian ini menggunakan sumber data secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah dengan:

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi penelitian dilaksanakan di lokasi yang menjadi obyek penelitian yaitu Pasar Perumnas Way Halim, Kota Bandarlampung, yaitu dengan mengobservasi karakteristik pedagang dan dampak sosial ekonomi yang muncul setelah program revitalisasi dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J. Moleong 2005: 186). Teknik wawancara dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan penelitian atau pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan ditanyakan pada informan, yaitu dampak apa saja yang muncul akibat program revitalisasi pasar tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto, gambar-gambar, dan arsip-arsip yang menunjukkan perubahan kondisi tempat lokasi revitalisasi pasar.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi maksud *sampling* dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).

Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang itu dianggap mengetahui tentang data apa yang kita butuhkan dalam penelitian, atau setidaknya mereka membantu kita dalam pengumpulan data sehingga memudahkan kita. Kriteria pedagang yang diteliti adalah pedagang yang menetap

dan asli pedagang yang mempunyai kios untuk berjualan baik sebelum dan sesudah revitalisasi.

G. Validitas Data

Validitas data ini penting dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pemeriksaan keabsahan data ini penulis membagi dengan empat cara, yaitu:

a. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama, triangulasi sumber yakni mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda yaitu dengan cara mencari data tertulis seperti data administrasi dari kelurahan dan data resmi Peraturan Daerah terkait Peraturan-peraturan pasar. Kedua, triangulasi metode yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan cara wawancara dan mengambil foto hasil observasi sebagai data tambahan. Untuk memperoleh data, maka digunakan beberapa sumber dari hasil wawancara dan observasi (Lexy J. Moleong, 2011: 330-331).

b. Perpanjang keikutsertaan, berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dengan memperpanjang keikutsertaan peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek (Lexy J. Moleong, 2011: 327-328).

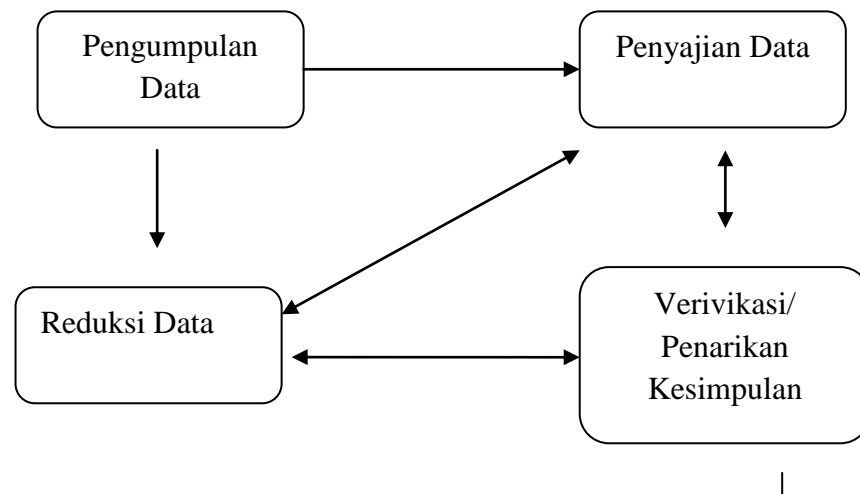
c. Diskusi dengan *expert* (ahli). Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan *expert* (ahli) dalam bentuk konsultasi atau diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkap dan diketahui. *Expert* (ahli) dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing.

d. *Peer group discussion* (diskusi dengan teman). Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan dalam bentuk diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkap dan diketahui agar pengertian mendalam dapat segera ditelaah. Melalui diskusi akan terjadi proses interaksi tukar menukar informasi antara peneliti dengan teman diskusi, sehingga peneliti akan memperoleh masukan positif terhadap penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Sesuai dengan penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Hubberman yang terdiri dari empat hal utama (Miles dan Huberman, 1992 : 15).

Gambar 3. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Empat hal utama dalam proses analisis data yang dilakukan diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penelitian tentang fenomena yang dijumpai. Catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilih, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan

membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan akhirnya secara tepat sesuai dengan permasalahan fokus utamanya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan, dari data yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya, hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dan saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim) ini diyakini mampu mevitalkan atau menghidupkan kembali gejolak usaha jual beli antar pedagang dan pembeli sebagai konsumen, dengan hasil tampilan fisik pasar yang lebih bagus dan pengelolaan manajemen serta perawatan kondisi pasar agar tetap sedap dipandang dan adanya peningkatan minat beli konsumen sehingga tercapainya kesejahteraan pedagang. Namun masih banyak terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga peneliti menilai bahwa Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus Pasar Perumnas Way Halim) ini masih perlu perbaikan. Adapun permasalahan dilihat dari tiga indikator yang peneliti ambil dari Dunn (2013:610) tersebut adalah :

1. Efektivitas

Permasalahan mengenai Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim pada indikator ini peneliti menilai bahwa sudah cukup efektif, pedagang dan juga konsumen/masyarakat memberi penilaian yang cukup positif karena menurut mereka dengan dilaksanakannya program revitalisasi pasar di Pasar Perumnas Way Halim ini sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka akan tempat berdagang dan juga berbelanja atau transaksi jual beli menjadi lebih nyaman.

2. Kecukupan (*adequacy*)

Mengenai program revitalisasi yang dilaksanakan di Pasar Perumnas Way Halim pada indikator ini peneliti menilai bahwa program ini telah dijalankan dengan baik, terbukti dengan adanya hasil dari perbaikan yang dilakukan terasa nyata setelah pelaksanaan program tersebut direalisasikan. Pedagang dan konsumen/masyarakat cukup berpartisipasi aktif dari sebelum program ini dilaksanakan, terlihat dari kepatuhan para pedagang yang diminta untuk mengosongkan pasar sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, dan juga konsumen/masyarakat yang masih tetap loyal untuk berbelanja di TPS Pasar Perumnas Way Halim yang letaknya terbagi menjadi dua tempat. Namun setelah program ini dilaksanakan, terlihat bahwa para mereka, khususnya pedagang, hanya berpikir untuk kembali berjualan seperti biasa saja, mereka masih sangat kurang dalam hal pemeliharaan dan juga pemanfaatan fasilitas yang telah diperbaiki, terutama mengenai pembuangan sampah yang mereka hasilkan saat selesai berdagang.

3. Perataan (*equity*)

Dalam indikator ini, Kementerian Perdagangan telah melakukan program ini secara adil dilihat dari banyaknya pembangunan atau revitalisasi pasar yang telah dilakukan disepanjang tahun 2015-2019 mencapai 4.211 unit dari target 5.000 unit. Pasar Perumnas Way Halim sendiri memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu umur pasar yang perlu direvitalisasi adalah pasar yang berumur 25 tahun atau lebih. Sehingga Pasar Perumnas Way Halim dinilai layak untuk mendapat alokasi dana demi memperbaiki atau merevitalisasi pasar tersebut.

4. Responsivitas

Dalam indikator ini, respon yang diberikan pedagang dan juga konsumen/masyarakat terhadap program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim ini dapat dikatakan baik, pedagang dan juga konsumen/masyarakat menyambut cukup baik mengenai rencana pelaksanaan revitalisasi ini yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan pasar agar dapat digunakan dengan nyaman saat transaksi jual beli berlangsung.

5. Ketepatan (efisiensi)

Dalam indikator efisiensi mengenai revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim ini dapat dikatakan sudah berjalan cukup efisien, dilihat dari

a. Sumber Daya Finansial (keuangan)

Pada hasil penelitian untuk indikator efisiensi, pelaksanaannya sudah cukup efisien dikarenakan pelaksanaan revitalisasi pasar ini menggunakan APBN tahun 2017, pemerintah pusat juga memberi dana yang dialokasikan untuk

pembangunan konstruksi fisik pasar dengan bekerja sama dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Anggaran yang diberikan juga telah dikelola dan digunakan dengan semaksimal mungkin demi menghasilkan perubahan dari segi bangunan fisik yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk indikator efisiensi pada sumber daya manusia, dapat dikatakan cukup efisien karena penyelesaian bangunan fisik yang cepat dan sesuai target pada tanggal kontrak yang telah disepakati, pedagang dan konsumen/masyarakatpun memiliki peran penting dalam partisipasinya mengenai pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang telah diperbaiki tersebut

6. Ketepatangunaan (*appropriateness*)

Dengan dijalankannya program revitalisasi pasar di Pasar Perumnas Way Halim ini, sudah pasti diikuti dengan munculnya dampak positif dan juga negatif yang dirasakan oleh pedagang dan juga konsumen/masyarakat. Karena bagi sebagian pedagang dan juga konsumen/masyarakat, melalui program ini mereka justru dihadapkan dengan masalah mengenai pembagian kios yang dinilai tidak transparan sehingga berdampak pada banyaknya pedagang yang justru kehilangan lapaknya. Dan sebagian lainnya merasa bahwa program ini memudahkan dan membuat mereka nyaman dalam bertransaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan observasi peneliti dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim di tahun-tahun berikutnya. Saran-saran yang dimaksud meliputi:

1. Dinas Perdagangan dan juga Pihak UPT Harus mengedepankan, mendengarkan dan memperhatikan kembali kondisi dan keinginan pedagang.
2. Dinas Perdagangan perlu mengawasi bagaimana transparansi pembagian kios dan los agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) demi terciptanya rasa adil bagi seluruh pedagang, serta bertindak tegas bila ditemukan kejanggalan maupun munculnya keluhan dari pedagang dalam pelaksanaan pengelolaan pasar.
3. Dinas Perdagangan dan juga Pihak UPT perlu menjunjung sikap profesional dalam bekerja demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban pasar.
4. Serta Dinas Perdagangan dan juga Pihak UPT perlu mengoptimalkan peran serta partisipasi pedagang dan juga konsumen/masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, serta pemeliharaan kebersihan pasar. Agar semakin banyak konsumen yang datang karena merasa nyaman saat berbelanja di Pasar Perumnas Way Halim.
5. Kedepannya, untuk pihak-pihak berwenang diharapkan mengadakan pelatihan atau pembinaan bagi pedagang pasar demi terberdayanya pedagang sebagai sumber daya manusia untuk terciptanya manajemen pengelolaan yang lebih baik dan lebih kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hosio, JE. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Laksbang. Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kotler Philip, Lanekeller Kevin. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid II. Edisi ketigabelas. Terjemahan Bob Sabran, MM. Erlangga. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, Rian. 2011. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____. 2006. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. CV. Adoya Mitra Sejahtera. Bandung.
- Sardiman. 2008. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Setiadi, Nugroho J. 2013. *Perilaku Konsumen Edisi Revisi*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Sinaga, Pariaman. 2004. *Pasar Modern vs Pasar Tradisional*. Kemetrian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1998. *Analisis Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Subarsono, M.Si., MA. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Penerbit Ombak. Jakarta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supawi, Pawengan. 2016. *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*. Program Pascasarjanan. UNIBA. Surakarta.
- Suratmo, F. Gunawan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum Edisi Ke 2*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra. Et.Al. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Ikip Malang. Malang.

- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Media Presindo. Yogyakarta.

Jurnal/Skripsi

- ANDAL Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG
- Armi, Aldinur, dkk. *Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.4 No. 10.
- Bachrir, S. 2013. *Deskripsi Kondisi Sosial Pengemis di Kota Kendari*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO. Kendari.
- D. Durianto, dan Liana. C.(2004). *Analisis efektivitas iklan televisi softener soft & fresh di Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan konsumen decision model*, Jurnal Ekonomi Perusahaan, Vol.11 (no.1): 35-55.
- Endrawanti, S. 2012. *Dampak Relokasi Pasar (Studi Kasus di Pasar Sampangan Kota Semarang)*. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
- Hasnawati. 2016. *Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Laino Raha*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Kedari.
- Irawan, D. R. 2015. *Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Bonggoeya Kendari*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO. Kendari.
- Irwan, Mahfauzi & Didik Kurniawan. *Revitalisasi Pasar Tradisional di Tengah Arus Pasar Modern*. Prodi Pendidikan Nonformal. Program Pascasarjana UNY 2016. Yogyakarta.
- Junariyah, S dan Basrowi. 2010. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 7 Nomor 1.
- Mudhito, Tri Arif. 2012. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar pada Pedagang Burung dari Ngasem ke Dongkelan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, Dongkelan, DIY)*. Skripsi S1. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S. 2014. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)*, Jurnal EP18187.
- Wulandari, Agnes Puspa. 2013. *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Program Rusunawa di Kawasan Pesisir Kota Bandarlampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Yeni, Fitri. 2013. *Pengaruh Keunggulan Bersaing Diferensiasi Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Pada KFC di Kota Padang*. Universitas Negeri Padang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 2, No. 4, (2013)1-7.
- Zakni, Muhammad Hafid. 2017. *Analisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Minat Beli Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pasar Tradisional Kangkung Bandarlampung)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Zunaidi. 2013. *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern*. Jurnal Sosiologi Islam, vol. 3, no. 1, hal 5164.

Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Sumber lain

Konsep Revitalisasi. 20 Februari 2018

<https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>

Progres Pembangunan, 20 Februari 2018

<https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/ProgresPembangunan.aspx>